

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rencana aksi 4 yang direkomendasikan oleh OECD. Untuk menganalisis bagaimana implementasi rencana aksi 4, penelitian ini menganalisis bagaimana penerapan peraturan pembatasan utang dan modal untuk penghitungan perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana proses pengawasan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mencegah terjadinya praktik *thin capitalization*. Tidak hanya proses implementasi dan pengawasan terhadap aturan tersebut, penelitian ini diharapkan juga dapat menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasi rekomendasi OECD tersebut.

Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Pemenuhan aspek validitas dan reliabilitas dilakukan dengan triangulasi sumber dan *member checking*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi rencana aksi 4 didasari oleh banyaknya penghindaran pajak melalui praktik tersebut di Indonesia dan nilai utang swasta luar negeri Indonesia yang makin meningkat. Proses pengawasan atas aturan ini dilakukan terhadap wajib pajak yang modalnya terdiri atas saham dan dilakukan sesuai dengan SE-05 tahun 2022 secara berjenjang oleh AR dan Fungsional. Keberhasilan implementasi peraturan ini didasari oleh komunikasi, peningkatan sumber daya baik teknologi maupun manusia, tetapi penghambat yang ada adalah celah hukum dan sistem pelaporan yang belum terotomatisasi.

Kata Kunci: *pembatasan bunga pinjaman, BEPS 4, thin capitalization, penghindaran pajak.*

ABSTRACT

This study aims to analyse the implementation of action plan 4 recommended by the OECD. To analyse how action plan 4 is implemented, this study analyses how debt and capital limitation regulations are applied for tax calculations. In addition, this study also analyses how the supervision process is carried out by the Directorate General of Taxes to prevent the practice of thin capitalization. Not only the process of implementing and supervising these regulations, it is hoped that this research will also be able to describe the factors that support and hinder the process of implementing the OECD recommendations.

To achieve the research objectives, the researcher used a qualitative approach. The data used in this research were the data from in-depth interviews and document review. Fulfilment of validity and reliability aspects is done by source triangulation and member checking.

The results of the study conclude that the implementation of action plan 4 is based on the large number of tax evasion through this practice in Indonesia and the increasing value of Indonesia's foreign private debt. The supervision process for this rule is carried out for taxpayers whose capital consists of shares and in accordance with SE-05 of 2022 in stages by AR and Functional. The successful implementation of this regulation is based on communication and increase in both technological and human resources. On the other hand, the obstacles that exist are legal loopholes and reporting systems that have not been fully automated.

Keywords: *limiting loan interest, BEPS 4, thin capitalization, tax evasion.*